

Analisis Konflik Struktural pada Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri Surabaya

Rafidah Rahmadani¹, Tha'lifvia Agustin², Avida Nuriah Salsabila³, Mohammad Ali Ridho⁴,
Revienda Anita Fitri⁵, Nuh Krama Hadianto⁶

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
Email: 24040674349@mhs.unesa.ac.id¹, 24040674363@mhs.unesa.ac.id²,
24040674366@mhs.unesa.ac.id³, 24040674370@mhs.unesa.ac.id⁴,
reviendafitrie@unesa.ac.id⁵, nuhhadianto@unesa.ac.id⁶

Abstract. *This study aims to analyze structural conflicts in the implementation of the Independent Curriculum in public senior high schools in Surabaya. The Independent Curriculum, as the latest education policy, emphasizes flexible learning, character building, and student-centered learning. However, in practice, the implementation of this curriculum still faces various challenges that have the potential to create structural conflicts within the education system. This study used a qualitative approach with a literature study method, sourced from scientific articles and other relevant literature published between 2020 and 2025. The data analysis technique used content analysis through data reduction, categorization, and interpretation. The results indicate that structural conflicts are caused by a mismatch between central government policies and school conditions, characterized by limited teacher competency, gaps in infrastructure, and weak coordination. The impact is evident in suboptimal learning and inconsistent student learning experiences. Therefore, teacher capacity building, strengthened mentoring, equitable distribution of facilities, and more adaptive and contextual policies are needed.*

Keywords: *Independent Curriculum, structural conflict, policy implementation, education, high school.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik struktural dalam implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri Kota Surabaya. Kurikulum Merdeka sebagai kebijakan pendidikan terbaru menekankan fleksibilitas pembelajaran, penguatan karakter, dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Namun, dalam praktiknya, implementasi kurikulum ini masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menimbulkan konflik struktural dalam sistem pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature study), yang bersumber dari artikel ilmiah, serta literatur relevan lainnya yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2020-2025. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) melalui tahap reduksi data, kategorisasi dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik struktural disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan kondisi sekolah, yang ditandai oleh keterbatasan kompetensi guru, kesenjangan sarana prasarana, serta lemahnya koordinasi. Dampaknya terlihat pada belum optimalnya pembelajaran dan ketidakkonsistenan pengalaman belajar siswa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas guru, penguatan pendampingan, pemerataan fasilitas, serta kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka, konflik struktural, implementasi kebijakan, pendidikan, sekolah menengah atas

Received Apr 22, 2026; Revised Apr 30, 2026; Accepted May 29, 2026

* Rafidah Rahmadani: Email: 24040674349@mhs.unesa.ac.id

PENDAHULUAN

Kurikulum memiliki peran yang sangat penting menjadi dalam sistem pendidikan karena menjadi pedoman utama dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Seiring dengan perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta meningkatnya tuntutan terhadap kompetensi abad ke-21, pemerintah Indonesia secara berkala melakukan penyempurnaan kurikulum agar sistem pendidikan tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Salah satu kebijakan terbaru yang diterapkan dalam Kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum yang dirancang untuk memberikan keleluasaan dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik, memperkuat pendidikan karakter, dan menciptakan proses belajar yang lebih berpusat pada siswa (Rahmadayanti & Haryoto, 2022). Meskipun secara konseptual Kurikulum Merdeka menawarkan pendekatan yang lebih adaptif dan inovatif, implementasinya di lapangan, khususnya di SMA Negeri Surabaya, masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Permasalahan utama yang muncul terletak pada belum meratanya kesiapan sekolah dan guru dalam menjalankan perubahan sistem pembelajaran yang dituntut oleh Kurikulum Merdeka. Dalam praktiknya, masih banyak guru yang mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran diferensiasi, menyusun modul ajar, serta mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dalam kegiatan belajar mengajar (Budi et al., 2025). Disamping itu keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya literasi digital, serta belum optimalnya koordinasi antar pemerintah, sekolah, dan pihak terkait lainnya turut menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan ini (Hidayat et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang dirancang di tingkat pusat sepenuhnya selaras dengan kapasitas dan kondisi objektif sekolah sebagai pelaksana utama kebijakan pendidikan.

Permasalahan ini penting untuk dikaji karena keberhasilan implementasi kurikulum sangat menentukan kualitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Jika hambatan-hambatan tersebut tidak diatasi, maka tujuan Kurikulum Merdeka untuk menciptakan pembelajaran yang fleksibel, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik akan sulit diwujudkan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh guru yang menghadapi peningkatan beban kerja dan ketidakpastian dalam pelaksanaan pembelajaran, tetapi juga oleh peserta didik yang berpotensi mengalami perbedaan kualitas pengalaman belajar, metode penilaian, dan hasil pembelajaran antar sekolah. Oleh karena itu kajian mengenai implementasi kurikulum merdeka perlu dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam akar permasalahan yang terjadi sekaligus merumuskan alternatif solusi yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan implementasi Kurikulum Merdeka masih menghadapi tantangan di berbagai daerah di Indonesia. (Handayani & Sholikah, 2024) menemukan bahwa kemampuan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya optimal. (Iskandar et al., 2023) menjelaskan bahwa keterbatasan fasilitas serta rendahnya kesiapan teknologi menjadi hambatan utama dalam penerapan kurikulum baru. Sementara itu, (Ani Marlia et al., 2024) menunjukkan bahwa kurangnya pendampingan dan lemahnya koordinasi kelembagaan menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara maksimal. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa permasalahan implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut persoalan struktural dalam tata kelola pendidikan.

Untuk memahami persoalan tersebut secara lebih mendalam, penelitian ini menggunakan perspektif Max Weber mengenai birokrasi. Weber memandang bahwa organisasi modern bekerja melalui sistem yang ditandai oleh aturan formal, hierarki kewenangan, dan

pembagian tugas yang rasional. Dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka, pemerintah berperan sebagai pihak yang merumuskan kebijakan, sedangkan sekolah dan guru menjadi pelaksana yang harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Konflik dapat muncul ketika kebijakan yang disusun secara birokratis tidak sepenuhnya mempertimbangkan kondisi riil sekolah, sehingga terjadi ketegangan antara tuntutan formal dengan kemampuan organisasi dalam melaksanakannya. Perspektif ini memungkinkan penelitian untuk melihat implementasi Kurikulum Merdeka sebagai proses yang dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan, distribusi sumber daya, dan dinamika birokrasi pendidikan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena tidak hanya mengidentifikasi hambatan implementasi Kurikulum Merdeka, tetapi juga menganalisis bentuk konflik struktural yang muncul, faktor-faktor penyebabnya, dampak terhadap proses pembelajaran, serta upaya penyelesaiannya. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini mengintegrasikan berbagai hasil penelitian empiris dan kajian teoritis untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri Surabaya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik struktural dalam implementasi Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perspektif Max Weber. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian manajemen konflik pendidikan serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan sekolah dalam merumuskan kebijakan yang adaptif, kontekstual, dan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) yang berfokus pada analisis kritis terhadap hasil penelitian empiris terkait implementasi Kurikulum Merdeka dan dinamika konflik struktural dalam sistem pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengintegrasikan berbagai temuan penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi pola permasalahan yang terjadi pada level implementasi kebijakan

pendidikan di satuan pendidikan (Curriculum, 2025). Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal, khususnya yang membahas implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat sekolah menengah. Beberapa rujukan utama mencakup penelitian mengenai kesiapan guru, hambatan implementasi, serta dinamika organisasi sekolah dalam merespons perubahan kurikulum (Penggerak, 2024). Selain itu, literatur mengenai konflik struktural dalam organisasi publik juga digunakan untuk memperkuat analisis konseptual (Istnaini et al., 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis menggunakan database ilmiah seperti Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), dan portal SINTA Kemdikbud. Kata kunci yang digunakan meliputi “implementasi Kurikulum Merdeka”, “hambatan Kurikulum Merdeka”, “konflik kebijakan pendidikan”, “manajemen perubahan pendidikan”. Kriteria inklusi dalam pemilihan literatur meliputi (1) artikel dipublikasikan dalam rentang tahun 2020- 2026, (2) berfokus pada konteks pendidikan Indonesia, dan (3) memiliki relevansi langsung dengan implementasi kebijakan kurikulum atau konflik dalam organisasi pendidikan (Sma et al., 2025).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi temuan. Peneliti mengelompokkan berbagai bentuk permasalahan implementasi Kurikulum Merdeka seperti keterbatasan sumber daya, resistensi aktor pendidikan, dan lemahnya koordinasi kelembagaan ke dalam kerangka konflik struktural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil telaah literatur, implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri Surabaya memperlihatkan berbagai dinamika yang dapat dipahami sebagai bentuk konflik struktural dalam birokrasi pendidikan. Dalam pandangan Max Weber, organisasi birokrasi bekerja melalui aturan formal, pembagian tugas yang jelas, dan hierarki kewenangan yang terstruktur. Konflik muncul ketika ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas tidak sepenuhnya sejalan dengan kemampuan organisasi pelaksana dalam menjalankannya. Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai perumus kebijakan, sedangkan sekolah dan guru menjadi pelaksana utama. Ketika tuntunan kebijakan tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya dan kapasitas organisasi, implementasi kebijakan berpotensi menimbulkan ketegangan dalam sistem pendidikan.

Bentuk Konflik Struktural dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Salah satu bentuk konflik struktural yang tampak dalam implementasi Kurikulum Merdeka adalah adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan tingkat pusat dan kondisi faktual di sekolah. Kurikulum Merdeka menuntut guru untuk menyelenggarakan pembelajaran diferensiasi, menyusun perangkat ajar secara mandiri, dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Namun, tidak semua guru memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai untuk memenuhi tuntutan tersebut. (Suryanti et al., 2025) menunjukkan bahwa sebagian guru masih mengalami kesulitan dalam merancang pembelajaran diferensiasi secara efektif.

Konflik struktural juga terlihat dari perbedaan ketersediaan sarana dan prasarana antar sekolah. Sekolah yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap dengan sumber daya terbatas menghadapi hambatan dalam menyediakan media dan lingkungan belajar yang mendukung. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi sumber daya pendidikan belum merata, sehingga implementasi Kurikulum Merdeka berlangsung dengan tingkat keberhasilan yang berbeda di setiap sekolah (Asep et al., 2025).

Disamping itu, koordinasi antar pemerintah, dinas pendidikan, dan sekolah belum berjalan secara optimal. Informasi mengenai kebijakan dan petunjuk pelaksanaan seringkali dipahami secara berbeda oleh masing-masing sekolah. Dalam perspektif Weber, kondisi ini mencerminkan belum efektifnya mekanisme komunikasi dan koordinasi dalam birokrasi pendidikan, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak berjalan secara konsisten.

faktor Penyebab Konflik Struktural

Munculnya konflik struktural dalam implementasi Kurikulum Merdeka dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait. Faktor pertama adalah kompetensi guru. Sebagai pelaksana utama kebijakan, guru dituntut untuk menguasai berbagai aspek baru dalam Kurikulum Merdeka, seperti penyusunan modal ajar, asesmen diagnostik, dan pembelajaran berbasis proyek. Namun, (Al Fachri, 2025) mengungkapkan bahwa banyak guru masih mengalami kendala dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

Faktor berikutnya berkaitan dengan kemampuan organisasi sekolah dalam merespon perubahan. Tidak semua sekolah memiliki sistem manajemen yang kuat untuk mengelola implementasi kurikulum, baik dalam hal perencanaan, supervisi, maupun penguatan budaya kerja yang mendukung inovasi pembelajaran (Impriasih, 2026). Akibatnya, sekolahnya mengalami kesulitan dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik yang efektif.

Selain itu, karakter kebijakan yang cenderung bersifat top-down turut memperbesar potensi konflik. Kebijakan yang disusun secara sentralistik tidak selalu mempertimbangkan perbedaan kondisi antar sekolah. Situasi ini semakin kompleks ketika pendampingan dari pihak terkait belum dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.

Secara umum, konflik struktural terjadi karena terdapat ketidakseimbangan antara tuntutan birokrasi dengan kapasitas organisasi pelaksana. Ketika kebijakan diberlakukan tanpa dukungan sumber daya, kompetensi, dan pendampingan yang memadai, maka proses implementasi rentan menimbulkan hambatan dan ketegangan.

Dampak Konflik terhadap Proses Pembelajaran

Konflik struktural yang terjadi dalam implementasi Kurikulum Merdeka berdampak langsung terhadap pembelajaran di kelas. Guru sering mengalami kebingungan dalam menentukan strategi pembelajaran yang seharusnya berpusat pada peserta didik belum dapat dilaksanakan secara optimal (Izzatunnisa et al., 2024).

Selain itu, perubahan kurikulum juga menambah beban administratif guru. Penyusunan modul ajar, instrumen asesmen, dan perangkat pembelajaran lainnya memerlukan waktu serta energi yang cukup besar. Kondisi ini menyebabkan guru lebih banyak berfokus pada pemenuhan administrasi daripada mengembangkan inovasi pembelajaran (Yahya & Martha, 2025).

Bagi peserta didik, perbedaan kesiapan guru dan ketersediaan fasilitas menyebabkan kualitas implementasi Kurikulum Merdeka tidak merata. Sebagian siswa memperoleh pengalaman belajar yang aktif dan kontekstual, sementara siswa di sekolah lain masih menghadapi pembelajaran yang cenderung konvensional. Ketimpangan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan hasil belajar antar sekolah (Praekanata et al., 2024).

Upaya Resolusi Konflik Struktural

Penyelesaian konflik struktural dalam Implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan langkah yang terencana dan berkesinambungan. Upaya yang paling mendasar adalah meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan yang sistematis. Program seperti in-house training, komunitas belajar, dan berbagi praktik baik antar guru terbukti dapat meningkatkan kesiapan guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka (Susilowati, 2022). Selain peningkatan kapasitas guru, koordinasi antara pemerintah, dinas pendidikan, dan sekolah juga perlu diperkuat. Menurut Weber, efektivitas birokrasi sangat dipengaruhi oleh kejelasan pembagian peran, alur komunikasi, dan mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, pendampingan implementasi perlu dilakukan secara konsisten agar sekolah memperoleh arahan dan dukungan teknis yang memadai.

Pemerintah juga perlu menyusun kebijakan yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi dan kapasitas masing-masing sekolah. Kebijakan yang disusun secara partisipatif akan lebih realistis untuk diterapkan dan mampu mengurangi kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Dengan demikian, implementasi Kurikulum Merdeka dapat berjalan secara lebih efektif, merata, dan berkelanjutan (Samsu, 2025).

Secara keseluruhan, konflik struktural dalam implementasi Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh kesiapan organisasi pelaksana, pemerataan sumber daya, dan efektivitas birokrasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Perspektif Max Weber menegaskan bahwa birokrasi akan bekerja secara optimal apabila mampu menjalankan aturan formal secara rasional sekaligus responsif terhadap kondisi nyata di tingkat sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri Surabaya masih menghadapi konflik struktural yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kebijakan di tingkat pusat dengan kondisi riil di tingkat sekolah. Konflik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu keterbatasan kompetensi guru dalam memahami dan mengimplementasikan kurikulum, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta lemahnya koordinasi dan pendampingan dari pihak terkait. Selain itu, kebijakan yang cenderung bersifat top-down tanpa mempertimbangkan kesiapan sekolah turut memperkuat terjadinya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Dampak dari konflik struktural tersebut terlihat pada belum optimalnya proses pembelajaran, dimana guru masih mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta adanya ketidakkonsistenan pengalaman belajar yang diterima siswa. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan implementasi

Kurikulum Merdeka tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan sistem organisasi pendidikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif, antara lain melalui peningkatan kapasitas guru secara berkelanjutan, penguatan pendampingan dan supervisi dalam implementasi kurikulum, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap kondisi masing-masing sekolah, sehingga implementasi Kurikulum Merdeka dapat berjalan lebih efektif dan mampu mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan secara optimal.

REFERENSI

- Al Fachri, K. (2025). Analisis Tantangan Guru dalam Integrasi Pembelajaran Berbasis Proyek pada Kurikulum Merdeka. *Pedagogia: Jurnal Pendidikan Dasar*, 5(2), 72–80.
- Ani Marlia, Aulia Violeta Rieartika, Shevia Indriani, Leyin Iklimah, Tenti Wulandari, Tria Karunia, & Aisyah Sina Dewi. (2024). Menelaah Kendala Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar: Slr. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama*, 2(3), 100–106. <https://doi.org/10.59024/jipa.v2i3.744>
- Asep, Damanik, N. H. S., Mirsel, R., Camerling, L. Y., Wahjudin, L., Nur, A. M., Muhammad, G., Hayat, M., Suarjana, I. W., & Ledyawati, L. (2025). *Konflik sosial dan resolusi konflik: Kajian sosiologi perspektif pendidikan, ekonomi, dan hukum*. Star Digital Publishing.
- Budi, I. B. K., Fauziah, D. N., Maftuh, B., & Somantri, M. (2025). Analisis Model PjBL Untuk Meningkatkan Pembelajaran Terdiferensiasi di Sekolah Dasar. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 15(3), 240–250.
- Curriculum, M. (2025). *Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pendidikan Indonesia : Kajian Literatur Implementation Of the Merdeka Curriculum in Indonesian Education : A Literature*. 1(2), 83–91. <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.386>
- Handayani, B. D., & Sholikhah, M. (2024). *Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pendampingan Penyusunan Perencanaan Pembelajaran Berbasis Kurikulum Merdeka*. 5(2), 416–431.
- Hidayat, H., Syafrina, M., Gusdi, W., Putra, F. R., Yetti, Y., Mandasari, P. Y., & Sufani, S. (2025). TRANSFORMASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR, PERKEMBANGAN, HAMBATAN, DAN IMPLEMENTASI DI ERA MODERN. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(04), 112–123.

- Impriasih, I. N. (2026). Kapasitas Guru dalam Implementasi Perubahan Kurikulum: Perspektif Manajemen Pendidikan di SMP Se-Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(01).
- Iskandar, S., Rosmana, P. S., & Fatimah, A. Z. (2023). *Problematika Penerapan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar*. 3, 1594–1602.